

**PENERAPAN SISTEM INFORMASI MY SAPK BKN UNTUK MEWUJUDKAN TERTIB  
ADMINISTRASI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA DENPASAR**

Luh Md. Adinda Sukma Prabandari  
NPP. 29.1230  
*Asdaf Kota Denpasar Provinsi Bali*  
*Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah*

Email: dindaprabandari2802@gmail.com

**ABSTRACT**

The author focuses on the problem that The problem experienced in staffing services is that employee disorder is still found, namely data from civil servants who are no longer active but still get salaries from the government every month. **Purpose:** The purpose of this study was to determine and analyze application of BKN's MY SAPK information system to realize civil servants administration in the civil services and human resources development agency in the city of Denpasar. **Method:** This study uses a descriptive qualitative method with an inductive approach and an analysis of the theory of Zulkifli Amsyah regarding management information system. Data collection techniques using in-depth interviews (6 informants), documentation and observation. **Results:** Based on the results of the research that has been done, it can be concluded that the application of the information system of the MY SAPK BKN application, especially the updating of employee data is still not optimal, such as the application system is still weak, as evidenced by the presence of invalid or unupdated employee data so that employees cannot update the data. **Conclusion:** application of BKN's MY SAPK has been quite effective, although there are still some obstacles. Therefore, efforts are needed to be made, namely providing features and upgrading the system for updating civil servant data.

**Keywords:** Information System, MY SAPK BKN, Orderly Administration

**ABSTRAK**

Penulis berfokus pada permasalahan masih masih ditemukannya ketidaktertiban pegawai dengan yaitu adanya data dari pegawai negeri sipil yang sudah tidak aktif namun masih mendapatkan gaji dari pemerintah pada setiap bulannya. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis mengenai penerapan sistem informasi My SAPK BKN untuk mewujudkan tertib administrasi pegawai negeri sipil pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dan analisis terhadap teori sistem informasi manajemen oleh Zulkifli Amsyah..

Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara mendalam (6 informan), dokumentasi dan observasi. **Hasil/Temuan:** bahwa penerapan sistem informasi dari aplikasi MY SAPK BKN khususnya pemuktahiran data pegawai masih belum maksimal seperti sistem aplikasi masih lemah dibuktikan dengan terdapatnya data pegawai yang tidak valid atau belum diperbaharui sehingga pegawai tidak bisa melakukan pemuktahiran data. **Kesimpulan:** Aplikasi My SAPK BKN ini sudah cukup efektif, meskipun masih ada beberapa kendala. Oleh karena itu diperlukan upaya yang harus dilakukan yaitu memberikan fitur terbaru dan melakukan upgrade sistem untuk pembaharuan data pegawai negeri sipil.

**Kata Kunci:** Sistem Informasi, My SAPK BKN, Tertib Administrasi

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Aparatur Sipil Negara sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menjelaskan pada bab 1 ayat 1 yaitu Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil yang memiliki perjanjian kerja dengan pemerintah Indonesia. Hal tersebut menjelaskan bahwa aparatur sipil negara memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan program yang di buat oleh pemerintah itu sendiri.

Sesuai dengan Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* berfungsi sebagai salah satu program terselenggaranya pemerintah yang baik serta bertambahnya kualitas layanan publik yang efektif dan efisien, tentunya dibutuhkan adanya kebijakan serta strategi dari pengembangan *e-government* tersebut. Salah satu dari pemanfaatan sumber teknologi yang berbasis komputer tersebut dengan terbentuknya sebuah sistem yang di buat oleh BKN sendiri yaitu sistem informasi manajemen kepegawaian yang handal dengan harapan terwujudnya data Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akurat melalui Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian secara Online (SAPK).

Namun seiring dengan diberlakukannya aplikasi tersebut menurut Kepala Badan Kepegawaian Negara mengungkapkan, sebanyak 97 ribu database aparatur sipil negara (ASN/PNS) yang tidak jelas keberadaannya namun mendapatkan gaji dan iuran pensiun. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan banyak data dari ASN yang tidak akurat atau *valid*. Sehingga, pemerintah hanya membayar gaji namun tidak ada orangnya. Selain itu BKN telah mengatakan bahwa pada tahun 2014 telah melakukan pendataan ulang Pegawai Negeri Sipil melalui elektronik dan dilakukan sendiri oleh masing-masing Pegawai Negeri Sipil. Namun ternyata sekitar 97.000 data yang terdaftar itu misterius sehingga dampaknya negara mengalami kerugian yang cukup besar akibat data misterius tersebut.

Menanggapi maraknya pegawai misterius yang tengah marak terjadi, BKN mengeluarkan kebijakan baru dengan meluncurkan sebuah aplikasi baru yaitu perkembangan dari aplikasi SAPK dengan nama MY SAPK BKN. Aplikasi ini merupakan aplikasi yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang memiliki tujuan untuk memudahkan pegawai negeri sipil (PNS) untuk mendapat pelayanan kepegawaian dengan aplikasi yang tersedia pada android dimana memiliki

kemudahan dalam penggunaannya. BKN meluncurkan aplikasi MY SAPK BKN ini untuk proses pengisian data pegawai seluruh Indonesia dengan memberikan kesempatan kepada para pegawai untuk mengakses dan mengisi data secara mandiri dikhususkan dalam pemuktahiran data pegawai tersebut. Pegawai Negeri Sipil seluruh Indonesia diberikan waktu mulai per bulan juli 2021 sampai September 2021 untuk mengisi kelengkapan data mereka. BKPSDM Kota Denpasar selaku wadah bagi para pegawai negeri sipil yang ada di Kota Denpasar tentunya sesuai fungsi dalam pelayanan kepegawaian juga turut andil dalam urusan pemuktahiran data pegawai tersebut.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil**

Permasalahan yang berkaitan dengan penerapan sistem informasi My SAPK BKN yaitu sebelum adanya aplikasi ini banyak pegawai negeri sipil yang masih belum tertib administrasi dalam urusan data kepegawaianya. Faktor yang menyebabkan hal tersebut diantaranya masih banyak pegawai yang masa bodo terhadap data administrasi pribadi mereka sehingga pelayanan kepegawaian tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Selain itu, birokrasi yang panjang juga menyebabkan para pegawai harus menunggu lama ketika akan mengurus urusan administrasi kepegawaian pribadi mereka. Dampak yang ditimbulkan adalah data pegawai yang menumpuk dan belum diperbaharui menyebabkan banyak pegawai yang sudah seharusnya pensiun namun karena data administrasi belum terselesaikan tetap mendapatkan gaji dan membuat negara menjadi rugi.

Setelah adanya aplikasi My SAPK BKN ini diharapkan pegawai negeri sipil khususnya pada Kota Denpasar dapat melakukan pemuktahiran data mandirinya didalam aplikasi sehingga harapannya data tersebut akan secara teratur terdaftar kedalam data yang dimiliki oleh Badan Kepegawaian Negara. Namun meskipun telah direalisasikannya aplikasi My SAPK BKN ini tetap saja tidak menutup kemungkinan terjadi hambatan yaitu masih adanya data pegawai yang belum valid sehingga pegawai tersebut tidak dapat melakukan pemuktahiran data mandiri.

## **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian sebelumnya, yaitu terkait dengan pelayanan SAPK. Penelitian Nindry Septya Pranita dengan judul *Inovasi Administrasi Kepegawaian Dengan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Dalam Mewujudkan Good Governance studi pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Batu* dimana dalam penelitian ini ditemukan bahwa Badan Kepegawaian Kota Batu telah melaksanakan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian online yang didalamnya terdapat aplikasi KGB online dan sudah secara layak penggunaannya.

Penelitian berikutnya yaitu penelitian dari Muhammad Fandy Asyik yang berjudul *Implementasi Kebijakan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat* dimana bahwa telah ditemukan masih banyak terdapat pegawai negeri sipil yang data SAPK, data DUK kepegawaian tidak sesuai dengan yang sebenarnya.

Penelitian berikutnya yaitu penelitian dari Wasiah Sufi dengan judul *Penerapan Sistem Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Berbasis Online pada Badan Kepegawaian Daerah Kota Pekanbaru* dimana bahwa telah ditemukan adanya kesiapan pemerintah dan kesiapan sumber daya manusia sehingga dapat berfungsi dengan baik.

#### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana objek yang diteliti oleh penulis yaitu aplikasi My SAPK BKN. Berbeda dari Nindry Septya Pranita, Muhammad Fandy Asyik dan Wasiah Sufi. Selain itu aplikasi My SAPK BKN adalah aplikasi baru dari pemanfaatan inovasi yang telah diciptakan Badan Kepegawaian Negara sehingga dalam proses penggunaannya pun masih perlu penyesuaian. Aplikasi My SAPK BKN ini pun juga menjadi salah satu jembatan bagi para pegawai negeri sipil untuk dapat tertib administrasi data pribadinya sendiri.

#### **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sistem informasi My SAPK BKN untuk mewujudkan tertib administrasi pegawai negeri sipil pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode deksriptif kualitatif dengan pendekatan induktif dikarenakan pendekatan kualitatif mampu mendeskripsikan fenomena sosial yang diharapkan dapat menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan Sistem Informasi dari My SAPK BKN ini

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 6 orang informan yang terdiri dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar, Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Pelaporan BKPSDM Kota Denpasar, Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi BKPSDM Kota Denpasar dan 3 Pegawai Negeri Sipil yang ada di Kota Denpasar.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis penerapan sistem informasi My SAPK BKN untuk mewujudkan tertib administrasi pegawai negeri sipil pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar menggunakan teori dari Zulkifli Amsyah. Teori tersebut memiliki 5 indikator dalam mengukur sistem informasi manajemen yaitu informasi, pelaksana, sistem, organisasi manajemen dan pengambilan keputusan. Adapun pembahasannya dapat dilihat dalam sub bab berikut:

### **3.1. Informasi**

Informasi dalam mewujudkan sebuah sistem informasi manajemen khususnya pada aplikasi My SAPK BKN dimana BKPSDM Kota Denpasar telah melaksanakan kewajibannya sebagai wadah bagi seluruh pegawai untuk terus memberikan informasi terkait kebijakan pengisian aplikasi My SAPK BKN, dengan terus mengedukasi para pegawai terkait pemuktahiran. BKPSDM Kota Denpasar senantiasa selalu menyampaikan informasi-informasi dan hal terkait dengan adanya aplikasi terbaru ini kepada seluruh ASN yang ada di Kota Denpasar. Melalui adanya seminar yang dilakukan lewat *zoom meeting* juga dengan langsung mendatangkan bagian teknis kepada setiap instansi yang ada juga

memudahkannya komunikasi antara pihak BKN maupun langsung terjun kepada para pegawai lainnya.

Hal terpenting dari informasi disini adalah untuk memudahkan lancarnya kegiatan yang akan dilaksanakan. Dapat dilihat dari pihak BKPSDM Kota Denpasar yang selalu mengikuti arahan serta kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah pusat sehingga kebijakan tersebut akan mudah terealisasi dan para pegawai pun semakin cepat dalam pengisian pemuktahiran data pribadinya sendiri.

### **3.2 Pelaksana**

Pelaksana khususnya bagi BKPSDM Kota Denpasar dimana sebagai salah satu Badan yang mengurus segala urusan kepegawaian di Kota Denpasar juga memiliki sumber daya manusia yang turun langsung menangani aplikasi My SAPK BKN. Pelaksana yang diharapkan disini adalah yang mampu untuk bisa menyampaikan pesan sebagaimana yang sudah diperintahkan oleh BKN terkait dengan pengisian data pribadi pegawai di aplikasi baru yakni My SAPK BKN. Selain itu, pelaksana disini juga diharapkan orang-orang yang memang ahli dalam bidangnya sehingga penerapan sistem informasi My SAPK BKN ini bisa terwujud dengan efektif serta efisien.

Ketika upaya pelaksana ini telah terlaksana dengan baik dan tidak ada ditemukannya kesenjangan antara satu dan lainnya, maka pengisian data pegawai untuk aplikasi My SAPK BKN akan terwujud sesuai dengan target yang telah ditentukan. Selain itu, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar akan tetap konsisten dalam menjalankan kewajibannya sebagai badan yang mewadahi dan ikut serta dalam mensukseskan pemuktahiran data pegawai pada aplikasi My SAPK BKN ini.

### **3.3 Sistem**

Sistem sangat diperlukan dalam penerapan sistem informasi My SAPK BKN dalam rangka menyukseskan program pemerintah agar seluruh pegawai yang ada di Indonesia dapat melaksanakan pemuktahiran data pribadinya sendiri. Sistem yang baik akan menghasilkan kualitas yang baik pula jika yang melaksanakan sistem tersebut saling bantu membantu untuk sebuah visi bersama. Dalam hal pemuktahiran data pegawai juga diperlukan sistem yang baik dimana khususnya BKPSDM Kota Denpasar harus mampu menggerakkan seluruh perangkat sistem yang ada didalamnya untuk bersama-sama menjadi contoh bagi instansi lain dimana ketika BKPSDM Kota Denpasar telah terlebih dahulu melaksanakan kewajiban itu, maini ka instansi lain pun akan mencontoh dan mengikuti apa yang telah dilakukan oleh BKPSDM Kota Denpasar itu sendiri.

Upaya sistem yang telah dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar sudah berjalan sesuai dengan pengertian sistem itu sendiri. Dilihat dari bagaimana cara yang dilakukan oleh BKPSDM Kota Denpasar dalam menyatukan visi antara pegawainya dan tegas dalam memberikan contoh terlebih dahulu kepada instansi lainnya yang terkait. Selain itu, upaya sistem yang dilakukan oleh BKPSDM Kota Denpasar juga sama-sama saling berintegrasi antara BKPSDM Kota Denpasar dan instansi lainnya sehingga Kota Denpasar mampu menduduki peringkat pertama di Kanreg X BKN dalam pengisian terbanyak pemuktahiran data My SAPK BKN.

### 3.4 Organisasi Manajemen

Organisasi manajemen adalah cara dari sebuah organisasi dalam menjalankan kegiatan organisasinya sehingga organisasi tersebut dapat berjalan sesuai dengan visi yang dibuat dari organisasi tersebut. Dalam organisasi manajemen juga diperlukan seseorang yang dapat dijadikan pemimpin untuk bisa memimpin anggota yang ada pada organisasi itu sendiri. Seorang pemimpin ini tentunya harus memiliki dedikasi serta kemampuan yang mampu membuat seluruh anggotanya untuk bergerak mengerjakan program-program yang akan dibuat pada organisasi tersebut.

Organisasi manajemen yang dilakukan oleh BKPSDM Kota Denpasar telah berjalan dengan baik dan secara sistematis. Setiap pegawai yang memang bertugas dalam urusan pengisian data My SAPK BKN selalu menjalin koordinasi terhadap atasan maupun anggota yang memang turun langsung ke lapangan. Organisasi manajemen yang telah dilakukan oleh BKPSDM Kota Denpasar juga menjadi salah satu tolak ukur dari berhasil atau tidaknya proses pemuktahiran data pegawai pada aplikasi My SAPK BKN tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari data rekapan yang dimiliki BKPSDM Kota Denpasar terkait pengisian data pegawai yang sudah masuk ke dalam *database* BKPSDM Kota Denpasar. Hal tersebut diharapkan terlaksananya pemuktahiran data pegawai yang lebih akurat, efektif dan efisien.

### 3.5 Pengambilan Keputusan

Dalam upaya pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk meningkatkan kesadaran pegawai dalam pemuktahiran data pribadi mereka, sudah sebaiknya BKPSDM Kota Denpasar dapat tegas dalam memberikan kebijakan-kebijakan untuk memperlancar proses pengisian data, sehingga seluruh pegawai tidak menganggap remeh kebijakan pemerintah tersebut. Pengambilan keputusan ini juga sebagai pemilihan alternatif dari perilaku tertentu dari dua atau lebih alternatif yang telah ada sehingga pemimpin mampu memilih suatu hasil dari alternatif yang memang memiliki dampak positif lebih banyak dibanding alternatif-alternatif lainnya.

Pengambilan keputusan yang telah dilakukan oleh BKPSDM Kota Denpasar juga membuktikan bahwa kebijakan yang dibuat oleh BKN Pusat adalah mutlak dan memang harus terealisasi dengan cepat, sehingga seluruh pegawai dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih akurat dan data pegawai yang memang *riil* pun juga akan terinput dengan benar.

### 3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan dari penerapan sistem informasi My SAPK BKN ini memberikan dampak positif selain bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar namun juga berdampak bagi pegawai negeri sipil yang ada. Dikarenakan aplikasi ini membantu para pegawai dalam mempermudah pelayanan kepegawaian pribadi mereka sehingga pegawai tidak usah repot kembali untuk mengurus segala urusan kepegawaiannya sendiri karena hanya bermodal *android* saja para pegawai dapat mengurus data pribadinya.

Aplikasi ini sudah berjalan cukup efektif seperti temuan Nindry Septya Pranita, 2020. Namun aplikasi ini masih memiliki kekurangan dimana masih ada beberapa data pegawai yang belum valid sesuai dengan data dari Badan Kepegawaian Negara.

Selain itu, aplikasi My SAPK BKN ini berbeda dari temuan Muhammad Fandy Asyik, 2020 dimana data pegawai yang sudah terdaftar didalamnya sesuai dengan NIK yang dimiliki masing-masing pegawai. Aplikasi My SAPK BKN juga mempunyai kekurangan lain dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yaitu aplikasi ini masih belum sepenuhnya dapat berjalan atau digunakan sepenuhnya karena masih adanya para pegawai yang belum penuh melakukan pemuktahiran data mandirinya kedalam aplikasi tersebut sehingga masih belum sepenuhnya siap seperti temuan dari penelitian Wasiah Sufi, 2020.

### **3.7. Diskusi Temuan Menarik Lainnya**

Penulis menemukan hambatan dalam penerapan sistem informasi My SAPK BKN ini yaitu para pegawai masih acuh tak acuh terhadap data pribadi mereka sehingga masih ditemukan beberapa data pegawai yang tidak *valid* dengan data yang dimiliki Badan Kepegawaian Negara sehingga beberapa pegawai tersebut tidak bisa melakukan pemuktahiran datanya secara 100%.

## **IV. KESIMPULAN**

Penulis menyimpulkan bahwa penerapan sistem informasi My SAPK BKN untuk mewujudkan tertib administrasi pegawai negeri sipil Kota Denpasar masih mengalami beberapa hambatan karena beberapa faktor seperti kurangnya persiapan dari Badan Kepegawaian Negara untuk benar-benar dapat mengoperasikan sistem dari aplikasi tersebut.

**Keterbatasan Penelitian.** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Zulkifli Amsyah.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*).** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan aplikasi My SAPK BKN untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

## **V. UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Denpasar beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Amsyah, Zulkifli. 2003. *Manajemen Sistem Informasi*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2010. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta : Prenada Media Group.
- Creswell, J.W. 2017. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. California: SAGE Publications.
- Dunn N. William. 2013. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Hasibuan, Malayu S. P. 2017. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Kadarisman, M. 2012. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Rajawali Press.
- La Dimuru, Ali Hadi. 2017. *Penyelenggaraan Tertib Administrasi Pemerintahan Desa*. Jurnal Sosial dan Politik Al-Qisthi: Volume VII
- Mangkunegara, A.A. Prabu 2014, *Manajemen Sumber Daya, Manusia Perusahaan*, Bandung: PT.Remaja Rosdakarya
- Marwansyah. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta
- Moelong, J. Lexy. 2011. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Moh.2013. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nurdin, Ismail. 2019. *Metodelogi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Silalahi, Ulber. 2012. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Simon, Habert. 1959. *Public Administration*. New York: Alfred Knopf
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan : Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Jakarta: PT Buku Kita
- Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Media Presindo